BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 222 /KPTS/09/2022

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja, dikoordinir oleh kepala unit pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

OPD | KABAG H M

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari:
   1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) area perubahan seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
   2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.
b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
c. mengimput hasil penilaian dalam aplikasi PMPRB online.



KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab tim penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. organisasi	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 222/KPTS/09/2022
TANGGAL : 13 April 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Drs. Adi Utama, M.M.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Drs. Ismet Inoni, M.M.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3	Ir. Sudarto M, M.M.	Inspektur	Sekretaris
4	Surahman, S.I.P., MM.	Kepala Bagian Organisasi	Asesor pada Pemerintah Daerah
	Sarjak, S.H.	Kepala Bagian Hukum	
	Rizki Prasetya Nugraha,S.H	Pelaksana	
	Suhendrawati,SKM,MP.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
	Nurtri Sarlina, S.I.P,MM.	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	
	Agus Rianto, S.I.P.	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
	Surti, SH.	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Kelembagaan dan Analisa Jabatan	
	Ricky Lestari, SH.	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	Novriansyah, ST.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab	
	Ulil Abror, SE.	Penyusun Barang Inventaris Bagian Umum Setdakab	
	Ummu Habibah, SE.	Analis Aset Negara Bagian Umum Setdakab	
5	Angga Satria Perdana, S.Kom.	Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Asesor pada Pemerintah Daerah dan unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Eka Arina, SE.	Pelaksana Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	
6	Anton Kurniawan, SE.	Kasubag Perencanaan	Asesor pada Pemerintah Daerah dan unit kerja Inspektorat Daerah
	Manaf Faisal, ST.	Pelaksana	

OPD KABAG HUKUM

7	Budi Kurniawan, SIP, MM. M. Iqbal Aldiansyah, SM.	Sekretaris Analis Perencanaan Anggaran	Asesor pada Pemerintah Daerah dan unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Irvan Leonardo A, SP,M.Si Tuti Riyanti, SE.	Sekretaris Kasubag Umum dan Kepegawaian	Asesor pada Pemerintah Daerah dan unit kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
9	Wiji Lestari, SE Rifki Andriyansyah, SAN.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Analisis Perencanaan,evaluasi dan pelaporan	Asesor pada Pemerintah Daerah dan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Alfian Barin, SIP, MM. Denti Rosita, S.Sos,MM	Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Madya	Asesor pada Pemerintah Daerah dan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Asnawati, SH. Yuskina, SH.	Pustakawan Ahli Muda Arsiparis Ahli Muda	Asesor unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Rina Wati, SIP. Elda, SH.	Kasubid Penanganan Konflik Kasubag Umum dan Kepegawaian	Asesor unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Sahril, S.Pd, MM. Aprida, S.Sos,	Sekretaris Kasubag Umum dan Perencanaan	Asesor unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
14	Riana Mayasari, SE, MM.	Pelaksana Rehabiilitasi dan Rekontruksi	Asesor unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Guy Zefred Da Silva ML,S. STP. M. Imam Kurniawan, S.Kom	Kepala bagian Umum dan Kehumasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Asesor unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16	Heriyanto, S.Kom. Sukimin, SIP, MM.	Kepala Bidang Kebersihan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Asesor unit kerja Dinas Lingkungan Hidup

OPD | KABAG HUKUM

17	Kurnianingsih, S.Ag. Nurliana, SIP.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Fungsional Perencana	Asesor unit kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
18	Yurzi, S.Pd,MM. Darwin. S, SE.	Sekretaris Kasubag Umum dan Perencanaan	Asesor unit kerja Dinas Ketahanan Pangan
19	Aliyurdin, S.sos, MH. Yunita Purnamasari, A,Md.	Sekretaris Pelaksana	Asesor unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan
20	Agus Supriyatna, SP. Prihatno Budisantoso,SP	Sekretaris Kasubag Umum dan Perencanaan	Asesor unit kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
21	Slamet Sutono, SIP, M.PH. Adi Saputra Pratama, S.ST.	Kasubag Umum dan Perencanaan Penata Laporan Keuangan	Asesor unit kerja Dinas Sosial
22	Nidia Afsari, ST. Arsita, S.Psi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Analis Penelitian dan Pengembangan	Asesor unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	Herlina, SIP. Herry Sugianto, A.Md.	Pelaksana Pelaksana	Asesor unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Agus Darma Putra, S.Si, M.Si. M Nur Rakhmat Dani, SKM.	Kepala Bagian Tata Usaha Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Asesor unit kerja RSUD Alimuddin Umar
25	Mia Miranda, ST. Abmi Putra Almabika,ST	Sekretaris Perencana Ahli Muda	Asesor unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26	Relegius Helman, SP,MM Umi Fitriyah, S.Pi	Sekretaris Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Asesor unit kerja Dinas Perikanan
27	Afriyanto Basa Banura, A.Md	Pelaksana	Asesor unit kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
28	Abdi Kirom, SH. Sukanto, SH.	Kasubag Perencanaan Kasubag Umum dan Kepegawaian	Asesor unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadaman Kebakaran dan Keselamatan

OPD

29	Cahyani S, SKM, M.Kes. Wasis Supriyadi,ST,M.ak Ruspan Ali, SKM Ernayanti,S.Farm,Apt,MPH. Ira Permatasari, S.Farm, Apt.	Sekretaris Kepala Bidang Sumber Daya kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Asesor unit kerja Dinas Kesehatan
30	Sitta Elida, SP Sugi Hartaji, S.Pt.	Sekretaris Kasubag Umum dan Perencanaan	Asesor unit kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
31	Drs. Junaidi, M.M. Rinayanti, S.IP.	Sekretaris Kasubag Umum dan Perencanaan	Asesor unit kerja Dinas Perhubungan
32	Asep Suganda, S.Pd, M.M. Darul Hisan, S.Pd.I.	Sekretaris Kasi Pendidik Tenaga Kependidikan	Asesor unit kerja Dinas Pendidikan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN III	
4	B. organisasi	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS